

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu metrik yang berguna untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kehidupan warganya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Umur panjang, melek huruf, dan kesejahteraan materi adalah pilar-pilar yang menjadi dasar kemajuan manusia, dan IPM mengukur seberapa baik kinerja setiap negara dalam ketiga hal tersebut (UNDP, 2024). Tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga menjadikannya salah satu tujuan utama pembangunan nasional.

Pandangan Todaro dan Smith (2021), pembangunan bukan hanya tentang meningkatkan kekayaan nasional; pembangunan juga harus mencakup peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Indikator multidimensi seperti IPM sejalan dengan gagasan bahwa pertumbuhan manusia adalah tentang memberikan lebih banyak pilihan kepada individu.

Senada dengan hal itu, Sukirno (2021) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan per kapita jangka panjang sekaligus meningkatkan struktur ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan sosial secara lebih adil. Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, yang diukur melalui hal-hal seperti akses layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok, merupakan salah satu ukuran efektivitas pembangunan ekonomi.

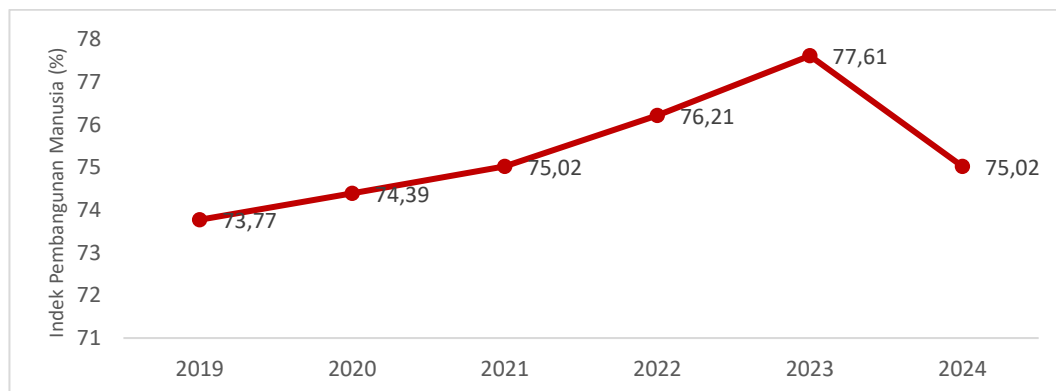
Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kondisi Pembangunan Manusia Indonesia terus membaik, ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik secara konsisten mencapai 75,02 pada tahun 2024 dan 75,90 pada 2025, berada dalam kategori "Tinggi". Peningkatan ini didorong oleh peningkatan di seluruh dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak), terutama standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita) dan pendidikan.

Meskipun terdapat beberapa ketidakmerataan regional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia akan mencapai 75,90 pada tahun 2025. Kesenjangan masih terlihat jelas terutama di wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara yang memiliki IPM jauh lebih rendah dibanding wilayah barat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih menghadapi masalah ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga peningkatan IPM secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2024), nilai IPM Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39 poin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,91 poin. Perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semuanya terlihat

di sini. Namun Indonesia masih memiliki masalah besar dengan ketidaksetaraan.

Berikut ini menunjukkan lintasan IPM Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024:



**Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2019–2024 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2019, IPM tercatat sebesar 73,77 poin. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai 74,39 poin pada tahun 2020, 75,02 poin pada 2021, dan 76,21 poin pada 2022. Tren peningkatan ini mencapai puncaknya pada tahun 2023, di mana IPM Indonesia berada pada posisi tertinggi, yaitu 77,61 poin. Kenaikan tersebut umumnya disebabkan oleh perbaikan pada peningkatan harapan hidup, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat.

Namun, pada tahun 2024, IPM mengalami penurunan cukup tajam menjadi 75,02 poin. Nilai ini menjadi IPM terendah setelah tahun 2019, dan penurunan tersebut dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi, ketidakstabilan kondisi sosial, atau gangguan pada layanan pendidikan dan kesehatan yang memengaruhi capaian indikator-indikator pembentuk IPM (BPS, 2025).

Pengangguran menjadi persoalan penting dalam pembangunan manusia. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan menghambat akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Berdasarkan data BPS (2024), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,32% pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya tingkat pengangguran akan menghambat pencapaian kesejahteraan karena berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan investasi pada modal manusia (Mankiw, 2019).

Seseorang dianggap menganggur jika mereka belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Sukirno (2021), Seseorang dianggap menganggur jika mereka secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu tetapi saat ini belum bekerja. Sementara Todaro & Smith, (2021) Pengangguran didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang tidak bekerja maupun tidak aktif mencari pekerjaan; ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh perekonomian.

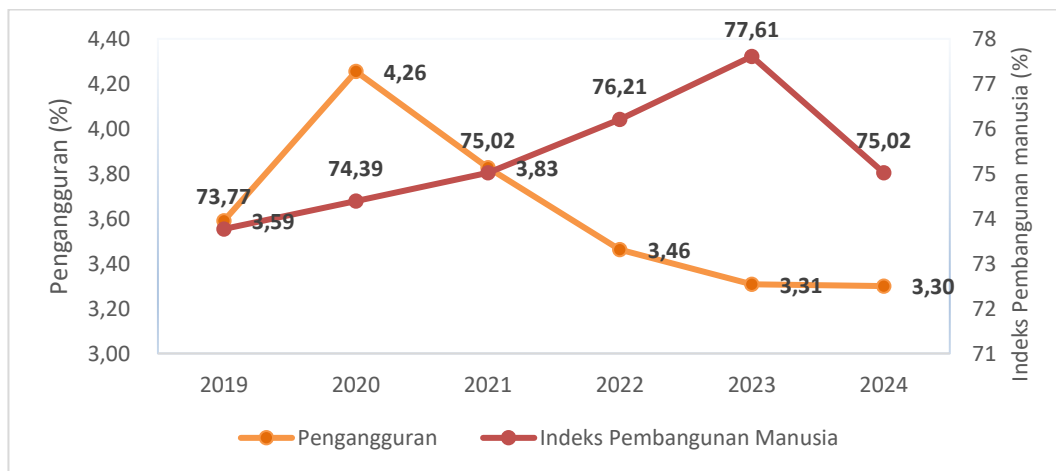
Baik IPM maupun tingkat pengangguran merupakan in IPM didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan, dan tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan pendapatan keluarga dan individu.

Hubungan negatif antara pengangguran dan pembangunan manusia diperkuat oleh penelitian Siregar, Lubis, dan Nasution (2023) yang menemukan bahwa peningkatan pengangguran berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup dan akses pendidikan di wilayah berkembang Indonesia. Penelitian oleh

Nugroho dan Prasetyo (2024) serta Suryani (2024), Fitriani dan Alamsyah (2021) menunjukkan bahwa pengangguran struktural pasca pandemi COVID-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan komponen standar hidup layak dalam IPM. Menurut penelitian Kasnelly & Wardiah, (2021) penurunan tingkat pengangguran berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, sebab semakin banyak masyarakat yang bekerja berarti semakin tinggi pula kemampuan ekonomi untuk berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan pengangguran di Indonesia masih menjadi perhatian, dimana jumlah pengangguran terbuka tercatat sekitar 7,2 juta orang pada 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (2025). Berbagai pemberitaan ekonomi nasional juga menyoroti bahwa peningkatan angkatan kerja tidak sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja. Tingginya pengangguran ini berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat dan keterbatasan dalam mengakses pendidikan serta layanan kesehatan, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas hidup dan memperlambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Adapun perkembangan pengangguran di Indonesia selama periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Pada Gambar 1.2, kita dapat melihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan menunjukkan beberapa fluktuasi antara tahun 2019 dan 2024. Saat ini, tingkat pengangguran berada di angka 3,59%. Setelah itu, pada tahun 2020, angka tersebut melonjak menjadi 4,26%, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi yang tercatat selama periode penelitian. Selanjutnya, tingkat pengangguran menurun hingga 2023 masing-masing menjadi 3,83% pada 2021, 3,46% pada 2022, dan 3,31% pada 2023. Pada tahun 2024, pengangguran kembali turun menjadi 3,30%, menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Fenomena menarik terlihat pada tahun 2020, yaitu ketika pengangguran meningkat, namun IPM justru tetap mengalami kenaikan dari 74,39 poin (2019) menjadi 74,39 poin pada 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran tidak selalu langsung menurunkan IPM.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata menjadi salah

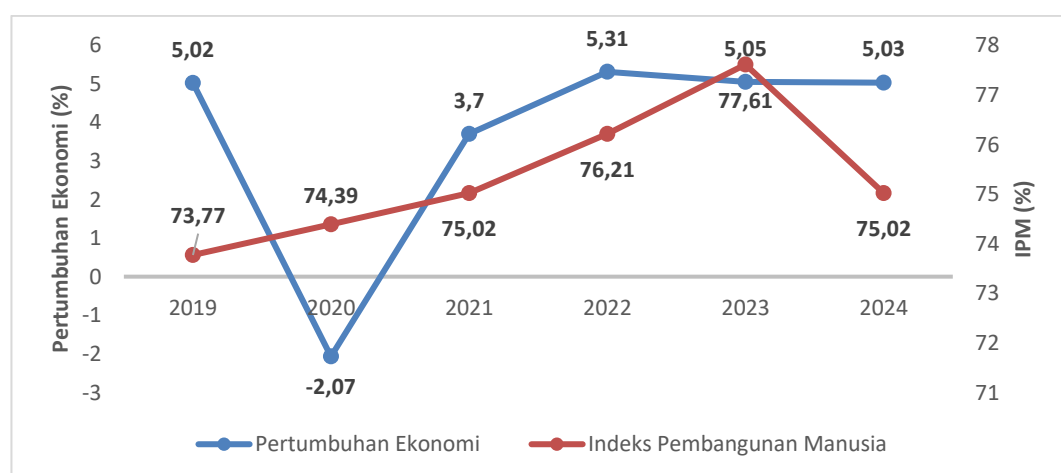
satu faktor utama dalam mendorong peningkatan IPM. Menurut Todaro & Smith, (2021), Secara keseluruhan, pembangunan manusia dapat didorong oleh ekspansi ekonomi yang pesat, yang meningkatkan upah dan membuat layanan kesehatan dan pendidikan lebih mudah diakses. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,05% pada tahun 2023, menunjukkan pemulihan yang stabil dari epidemi COVID-19. Namun demikian, perluasan kesejahteraan masyarakat belum terjadi secara bersamaan dengan pertumbuhan ini. Salah satu metrik umum untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonominya; Indonesia tidak terkecuali. Landasan kemakmuran ekonomi jangka panjang adalah pertumbuhan yang berkelanjutan.

Peningkatan pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi, dikaitkan dengan perekonomian yang makmur. Ketika perekonomian suatu negara berkembang pesat, lebih banyak orang bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang dan memiliki daya beli yang lebih besar untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Menurut Todaro & Smith, (2021), Tiga komponen utama IPM pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial—dapat dicapai ketika pemerintah mampu meningkatkan anggaran mereka secara berkelanjutan untuk bidang-bidang ini. Di sisi lain, IPM yang lebih tinggi dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Studi oleh Falah dan Syafri (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap IPM

akibat ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah. Penelitian oleh Le et al. (2025) pada negara berkembang Asia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berdampak positif terhadap IPM jika disertai investasi yang memadai di sektor pendidikan dan kesehatan. Disisi lain Suryani (2024), Fitriani dan Alamsyah (2021), serta Astri et al. (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5%, dinilai belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum merata ke seluruh daerah, terutama wilayah timur Indonesia. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan juga belum optimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan IPM secara merata di Indonesia (CNBN, 2025). Dari tahun 2019 hingga 2024, PDB Indonesia akan meningkat dengan cara-cara berikut:



**Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.3 menampakan jika dari tahun 2019 hingga 2024, pertumbuhan PDB Indonesia akan menunjukkan pola yang sangat bervariasi. Ekonomi nasional tetap stabil pada tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 5,02%. Namun pertumbuhan ekonomi melambat ke titik terendah sepanjang masa sebesar -2,07% pada tahun 2020, tahun terakhir data tersedia. Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,70 persen pada tahun 2021, menandai awal periode perbaikan. Pada tahun 2022, tren kenaikan berlanjut, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, tertinggi yang tercatat selama periode tersebut. Ekspansi ekonomi stabil di angka 5,03% pada tahun 2024 setelah mengalami perlambatan menjadi 5,05% pada tahun 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun dari 77,61 poin pada tahun 2023 menjadi 75,02 poin pada tahun 2024, yang merupakan fenomena menarik, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,05% menjadi 5,03% pada tahun 2024. Situasi ini menunjukkan bagaimana peningkatan PDB tidak selalu mengarah pada pembangunan manusia yang lebih baik.

Selain itu, pengeluaran publik memiliki dampak besar dalam meningkatkan IPM. Pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan pokok seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah contoh kebijakan fiskal yang efektif. Keynes (1936) dalam Mankiw (2019) menegaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja fungsi pendidikan mencapai 20% dari total APBN dan belanja kesehatan sebesar 9,3% pada tahun 2023, menunjukkan

komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan manusia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

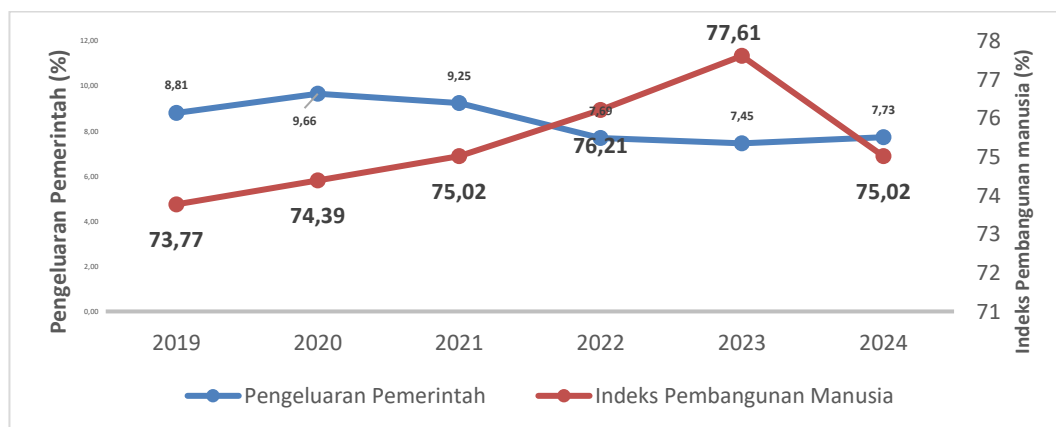
Karena merupakan alat utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, pengeluaran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Standar hidup dan output ekonomi suatu populasi dapat ditingkatkan secara substansial melalui investasi dalam perawatan kesehatan, sekolah, dan infrastruktur sosial. Sebagai alat kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dapat membantu menciptakan persaingan yang adil, menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memajukan peradaban manusia (Musgrave & Musgrave, 1989).

Pengeluaran pemerintah Indonesia untuk layanan kesehatan dan pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan IPM negara, menurut penelitian Alifia dan Khusaini (2024), tetapi dampaknya bergantung pada seberapa baik dana tersebut dikelola. Pengeluaran di tingkat federal lebih berpengaruh terhadap IPM dibandingkan pengeluaran di tingkat negara bagian atau lokal, menurut penelitian Sutono dkk. (2022).

Pengeluaran pemerintah di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari total tersebut, anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, berbagai pemberitaan juga menunjukkan bahwa efektivitas belanja negara masih menghadapi tantangan, termasuk adanya kebijakan efisiensi anggaran hingga

Rp306,69 triliun yang berdampak pada penyesuaian program di berbagai kementerian dan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran pemerintah sangat besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara merata, sehingga berdampak pada belum maksimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2026).

Dari tahun 2019 hingga 2024, grafik berikut menunjukkan evolusi pengeluaran pemerintah Indonesia:



**Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.4 pengeluaran pemerintah Indonesia selama periode 2019–2024 yang diukur dalam bentuk persentase menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2019, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 8,81 persen. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,66 persen, seiring dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai program pembangunan nasional. Namun, pada tahun 2021 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan menjadi 9,25 persen dan kembali menurun cukup tajam pada tahun 2022 sebesar 7,69 persen. Tren penurunan ini

berlanjut pada tahun 2023, di mana pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 7,45 persen, sebelum sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,73 persen.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan pada awal periode pengamatan, secara umum pengeluaran pemerintah dalam persentase cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan proporsi belanja pemerintah terhadap indikator ekonomi tertentu, meskipun pemerintah tetap berkomitmen dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Fenomena menarik terlihat ketika dikaitkan dengan IPM. Selama periode yang sama, IPM menampakkan tren meningkat dari 73,77 poin pada tahun 2019 menjadi 74,39 poin pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 75,02 poin pada tahun 2021 dan meningkat signifikan menjadi 76,21 poin pada tahun 2022 serta mencapai 77,61 poin pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, IPM justru mengalami penurunan menjadi 75,02 poin. Ini menampakkan jika meskipun pengeluaran pemerintah sempat meningkat pada tahun 2024, IPM tidak mengalami peningkatan yang sejalan.

Temuan ini bertentangan dengan gagasan yang memprediksi korelasi positif antara pertumbuhan PDB dan tingkat peningkatan indeks pembangunan manusia seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Penurunan IPM di tengah adanya kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentase mengindikasikan bahwa efektivitas alokasi belanja publik belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dapat disebabkan

oleh komposisi belanja yang kurang produktif atau adanya faktor lain di luar pengeluaran pemerintah yang turut memengaruhi capaian IPM

Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar, (2021) mendapati jika peningkatan IPM Indonesia berkorelasi signifikan dengan peningkatan pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan pendidikan. Temuan serupa dikemukakan oleh Arbianti & Suchaina, (2025) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Indonesia telah menjadi lokasi banyak penelitian tentang variabel-variabel yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun banyak penelitian tersebut masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Dari sisi cakupan wilayah, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada daerah tertentu, seperti Kota Bandung (Nursita et al., 2025), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Suryani, 2024), Provinsi Sumatera Utara (Simamora & Safuridar, 2024), serta Provinsi Jawa Timur (Amelia & Arisetyawan, 2024). Selain itu, beberapa penelitian juga hanya mencakup wilayah tertentu seperti Pulau Sumatera (Fitriani & Alamsyah, 2021) atau menggunakan pendekatan nasional tetapi berbasis data time series (Nugroho & Prasetyo, 2024; Falah & Syafri, 2023). Keterbatasan cakupan wilayah ini menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji IPM secara komprehensif pada seluruh provinsi di Indonesia dengan pendekatan data panel yang mampu menangkap variasi antarwilayah dan

dinamika waktu secara simultan. Padahal, Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam antarprovinsi, baik dari sisi tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, maupun kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan capaian IPM yang signifikan.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pengeluaran pemerintah dalam sektor tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan (Nursita et al., 2025; Simamora & Safuridar, 2024; Alifia & Khusaini, 2024), atau hanya mengkaji hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM tanpa memasukkan variabel pengeluaran pemerintah (Suryani, 2024; Fitriani & Alamsyah, 2021). Di sisi lain, terdapat juga penelitian yang mengkaji pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan langsung terhadap IPM (Cahyono & Putri, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel utama, yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, dalam satu model analisis untuk melihat pengaruhnya secara simultan terhadap IPM.

Selanjutnya, dari sisi hasil penelitian juga masih ditemukan inkonsistensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial (Suryani, 2024), sementara penelitian lain menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM (Nugroho & Prasetyo, 2024) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM meskipun tidak selalu signifikan (Falah & Syafri, 2023; Fitriani & Alamsyah, 2021). Di sisi lain, pengeluaran

pemerintah secara umum cenderung menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan (Nursita et al., 2025; Alifia & Khusaini, 2024), namun masih terdapat perbedaan dalam pengukuran dan klasifikasi belanja yang digunakan. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Selain itu, perbedaan metode analisis dan periode penelitian juga menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian masih menggunakan regresi linier berganda dengan data time series atau cross section (Nursita et al., 2025; Nugroho & Prasetyo, 2024), sementara penelitian lainnya telah menggunakan data panel namun masih terbatas pada wilayah tertentu (Suryani, 2024; Amelia & Arisetyawan, 2024). Oleh karena itu, studi ini mengintegrasikan aspek waktu dan spasial menggunakan teknik data panel nasional (seluruh provinsi di Indonesia). Harapannya, dengan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana faktor-faktor seperti pertumbuhan PDB, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah memengaruhi skor IPM Indonesia.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kombinasi variabel, cakupan wilayah, dan pendekatan data yang belum dilakukan secara bersamaan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya hanya fokus pada satu atau dua variabel saja, seperti pengeluaran pemerintah terhadap IPM, atau hubungan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dalam ruang lingkup wilayah yang terbatas misalnya provinsi tertentu, Pulau Sumatera, atau hanya sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk mendapatkan

gambaran yang lebih lengkap mengenai unsur-unsur pembangunan manusia di Indonesia, studi ini mengintegrasikan tiga variabel utama pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk dievaluasi secara bersamaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IMB) di tingkat nasional.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) yang mampu menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan dalam satu model. Metode ARDL memiliki keunggulan karena dapat digunakan pada data time series yang memiliki tingkat integrasi berbeda, baik pada level  $I(0)$  maupun  $I(1)$ , serta tetap menghasilkan estimasi yang valid dan efisien.

Pendekatan ARDL juga dilengkapi dengan uji kointegrasi Bound Test yang dapat menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel penelitian. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan adanya pengaruh antar variabel, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kecepatan penyesuaian menuju kondisi keseimbangan setelah terjadi perubahan pada variabel independen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dari penjelasan penelitian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan pada rumusan masalah diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan sejarah, deskripsi, dan tujuan yang dinyatakan terkait masalah ini, studi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Selain menambah pemahaman ilmiah kita, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi studi ekonomi dan pembangunan di masa mendatang yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Berpotensi berguna sebagai titik awal untuk studi yang meneliti Indeks Pembangunan Manusia di masa mendatang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah Indonesia untuk keperluan pembuatan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mendapatkan wawasan dan pemahaman yang berharga, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia.